



SITUS KOTA SUOYANG DI GUANGZHOU

Foto yang diambil pada Kamis (16/3) memperlihatkan reruntuhan Kota Suoyang di Kabupaten Guanzhou, Provinsi Gansu, Tiongkok. Situs Kota Suoyang adalah salah satu lokasi di sepanjang Jaringan Rute Koridor Chang'an-Tianshan dari Jalur Sutra, yang masuk dalam Daftar Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2014.

## Rakyat Korsel Tolak Rencana Kompensasi Kerja Paksa

Hasil survei Gallup Korea menunjukkan sekitar 59 persen responden menolak kompensasi.

**SEOUL(IM)** - Jajak pendapat menunjukkan sebagian besar masyarakat Korea Selatan (Korsel) menolak rencana pemerintah membayar kompensasi kerja paksa masa penjajahan Jepang. Ini merupakan langkah Perdana Menteri Yoon Suk Yeol untuk memperbaiki hubungan dengan bekas penjajah.

Hasil survei Gallup Korea pada Jumat (17/3) menunjukkan sekitar 59 persen responden menolak rencana tersebut karena lemahnya permintaan maaf dan sedikitnya kompensasi dari Jepang. Sekitar 64 persen menilai usulan kompensasi Yoon tidak cukup.

Jajak pendapat mengungkapkan 64 persen responden mengatakan Korsel tidak perlu terburu-buru memperbaiki hubungan dengan Jepang bila perilaku Tokyo tidak berubah.

Pengamat mengatakan penolakan dari Korsel hanya menimbulkan masalah kecil politik dalam negeri bagi Yoon, tapi dapat berdampak pada sejauh mana ia dapat

memenangkan kerja sama dengan Jepang.

Pada Perang Dunia II ratusan ribu orang Korea dipaksa bekerja untuk perusahaan Jepang atau menjadi budak seks di prostitusi militer Tokyo.

Sebagian besar korban kerja paksa sudah meninggal dunia dan penyintas yang tersisa berusia 90-an tahun.

Pada tahun 2018 Pengadilan Tinggi Korsel memerintahkan dua perusahaan Jepang yakni Nippon Steel dan Mitsubishi Heavy Industries untuk membayar kompensasi pada 15 korban kerja paksa, kini tinggal tiga yang masih hidup dan semuanya berusia 90 tahun lebih.

Dalam konferensi pers yang disiarkan di televisi Menteri Luar Negeri Park Jin mengatakan para korban akan mendapatkan kompensasi melalui yayasan milik pemerintah yang didanai dari sumbangan warga. Ia mengatakan Korsel berharap perusahaan-perusahaan Jepang juga akan

memberikan kontribusi sukarela ke yayasan tersebut.

"Kami membandingkannya dengan segelas air, saya gelasnya hanya setengah penuh, kami berharap kelanjutannya lebih penuh ke depannya dengan respon Jepang yang tulus," kata Park, Senin (6/3) pekan lalu.

Di hari yang sama Yoon mengatakan langkah Korsel "tekad untuk melangkah maju hubungan Korea-Jepang yang berorientasi masa depan." Ia mengatakan kedua negara harus saling membantu agar hubungan mereka memasuki era baru.

Pemerintah Korsel tidak menjelaskan lebih rinci perusahaan mana saja yang akan membiayai yayasan ini. Tapi pada bulan Januari, ketua dewan Yayasan untuk Korban Kerja Paksa Kekaisaran Jepang Shim Kyu-sun mengatakan dananya akan berasal dari perusahaan-perusahaan Korea yang mendapatkan untung dari perjanjian normalisasi hubungan Korsel-Jepang tahun 1965.

Perjanjian 1965 diikuti ratusan juta dolar pinjaman dan bantuan ekonomi dari Tokyo ke Seoul yang digunakan dalam proyek-proyek pembangunan yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar Korsel,

termasuk POSCO yang kini berusaha baja multinasional. POSCO mengatakan akan dengan aktif mempertimbangkan kontribusi pada yayasan bila menerima permintaan resmi.

Jepang bersikeras semua kompensasi sudah selesai dalam perjanjian 1965. Perintah pengadilan Seoul pada perusahaan Jepang memicu pembatasan ekspor bahan kimia ke industri semikonduktor Seoul pada tahun 2019.

Korsel yang saat itu dipimpin Moon Jae-in menuduh Jepang menjadikan perdagangan sebagai senjata dan membalasnya dengan menghentikan kesepakatan berbagi intelijen militer dengan Tokyo yang merupakan simbol kerja sama tiga arah dengan Washington.

"Saya yakin rakyat Korea akan mengerti betapa keras pemerintah bekerja untuk mengobat luka korban kerja paksa dan membangun hubungan Korea-Jepang yang berorientasi masa depan," kata Yoon dalam wawancara tertulis dengan media internasional, Rabu (15/3) kemarin.

Oposisi utama pemerintahan Partai Demokrasi (DP) meloloskan resolusi sepihak melalui komite hubungan luar negeri parlemen yang

mendesak Yoon menarik rencana kompensasi. Anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa memboikot rapat komite tersebut.

Lembaga hak asasi manusia Korsel mengatakan usulan kompensasi sudah sesuai dengan standar internasional.

"Karena masalah kompensasi korban kerja paksa adalah masalah penting untuk mengembalikan martabat manusia, semua langkah berlawanan harus mempertimbangkan dampak emosi dan psikologis para korban," kata ketua dewan Komisi Hak Asasi Manusia Nasional Korsel Song Doo-hwan pekan lalu.

Pengamat mengatakan lemahnya dukungan dari dalam negeri mempengaruhi kemampuan Yoon memenangkan konsesi dengan Jepang. Negeri Sakura berhati-hati dalam membuat kesepakatan dengan Korsel setelah kesepakatan kerja paksa perempuan Korsel di rumah bordil di masa penjajahan pada tahun 2015 lalu tersapu perubahan pemerintahan di Seoul.

"Perlawanan terakhir kami berasal dari rakyat," kata mantan dewan Akademi Diplomasi Nasional Korea Kim Joon-hyung. ● gul

## Jepang-Korsel Buka Lembaran Baru Lawan Tantangan Keamanan

**TOKYO(IM)** - Pemimpin Jepang dan Korea Selatan (Korsel) berjanji untuk membuka lembaran baru pada Kamis (16/3). Mereka mengaku perlu bekerja lebih erat untuk melawan tantangan keamanan regional.

Presiden Korsel Yoon Suk Yeol bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dalam kunjungan kenegaraan di Tokyo. Kunjungan ini adalah yang pertama bagi seorang presiden Korsel dalam 12 tahun.

"Pekan ini Tokyo melihat pohon sakuranya mekar sedikit lebih awal dari biasanya," kata Kishida saat keduanya saling berhadapan di seberang meja.

Khisida mengaku sangat senang memiliki kesempatan untuk memulai babak baru dari masa depan hubungan Jepang dan Korsel yang berwawasan ke depan. Dia mengaku dapat merasakan kedatangan musim semi.

Keduanya mengatakan akan memulai kembali "diplomasi antar-jemput" yang sebelumnya dihentikan dari kunjungan pemimpin reguler antar negara. "Pertemuan hari ini dengan Perdana Menteri Kishida memiliki arti khusus untuk memberi tahu rakyat kedua negara kita bahwa hubungan Korsel-Jepang, yang telah melewati masa-masa sulit karena berbagai masalah yang tertunda, berada pada titik awal yang baru," kata Yoon.

Urgensi situasi keamanan regional dan ancaman yang ditimbulkan oleh Korea Utara (Korut) ditekankan beberapa jam sebelum kedatangan Yoon.

Pemimpin Korsel mengatakan, peluncuran rudal balistik jarak jauh Pyongyang pagi itu telah menunjukkan "ancaman besar" terhadap perdamaian dan stabilitas internasional.

Yoon mengharapkan untuk memperkuat kerja sama keamanan. Kedua pemimpin bersiap untuk mengonfirmasi dimulainya kembali dialog keamanan bilateral yang telah ditangguhkan sejak 2018.

Selain masalah keamanan, kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan perselisihan perdagangan selama hampir empat tahun tentang bahan berteknologi tinggi yang digunakan untuk chip.

Masalah teknologi itu telah mengganggu hubungan mereka bahkan ketika kepentingan politik semikonduktor dan mengamankan pasokannya telah meningkat. Jepang akan menghapus pembatasan eksportnya ke Korsel untuk display dan chip smartphone. Sementara Seoul akan mencabut keluhan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terhadap Tokyo. Tokyo memberlakukan pembatasan pada 2019 karena ketegangan selama beberapa dekade dengan Seoul semakin dalam.

Hubungan antara keduanya, yang telah lama tertunda, karena masalah tenaga kerja masa perang serta pulau-pulau yang disengketakan. Masalah gadis-gadis Korea yang dipaksa bekerja di rumah bordil masa perang Jepang, membuat kemajuan minggu lalu. ● gul

## Iran Ingin Pulihkan Hubungan dengan Mesir

**TEHERAN(IM)** - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Naser Kanaani, mengatakan, Teheran ingin meningkatkan hubungan dengan Mesir. Dia menambahkan, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian dan Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi mengadakan pertemuan "cepat dan positif" selama KTT Baghdad II yang diselenggarakan di Yordania akhir tahun lalu.

"Mesir adalah negara penting di kawasan ini dan yang dibutuhkan kawasan adalah sinergi antara Iran dan Mesir, dan kami percaya dalam mengambil langkah baru untuk meningkatkan hubungan kami," kata Kanaani kepada wartawan, dilaporkan Middle East Monitor, Jumat (17/3).

Sejauh ini, belum ada komentar langsung dari Kairo terkait pernyataan Kanaani. Namun, pada Senin (13/3) surat kabar Saudi, Asharq Al-Awsat yang mengutip sumber di Kairo mengatakan bahwa, saluran komunikasi antara Kairo dan Teheran tidak berhenti dalam kerangka lingkaran khusus. Ada ekspresi dari penghargaan besar dan tingkat tinggi dari Iran untuk Mesir dan kepemimpinan politiknya. "Tidak ada titik perbedaan utama antara kedua belah pihak kecuali hubungan Teheran dengan Hamas Palestina dan gerakan Jihad Islam, serta mempertimbangkan prinsip umum Mesir yang menolak campur tangan dalam urusan internal negara-negara Arab," kata sumber itu.

Mantan menteri luar negeri Mesir Mohamed Orabi mengatakan, tidak ada kebutuhan strategis pada tahap saat ini untuk mempercepat langkah-langkah dalam hal pemulihan

hubungan dengan Iran. Kendati demikian, dia mengakui Iran adalah negara yang berperan besar di kawasan.

Hubungan Teheran dengan Kairo telah rusak sejak Revolusi Islam 1979 di Iran, terutama karena aliansi dekat Mesir dengan Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya. Keadaan menjadi lebih buruk ketika Shah Iran yang diasingkan, Mohammad Reza Pahlavi, diberikan suaka di Mesir, hingga akhirnya dia meninggal dan dimakamkan pada 1980.

Mantan menteri luar negeri Mesir Mohamed Orabi mengatakan, tidak ada kebutuhan strategis pada tahap saat ini untuk mempercepat langkah-langkah dalam hal pemulihan

hubungan dengan Iran. Kendati demikian, dia mengakui Iran adalah negara yang berperan besar di kawasan.

Hubungan Teheran dengan Kairo telah rusak sejak Revolusi Islam 1979 di Iran, terutama karena aliansi dekat Mesir dengan Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya. Keadaan menjadi lebih buruk ketika Shah Iran yang diasingkan, Mohammad Reza Pahlavi, diberikan suaka di Mesir, hingga akhirnya dia meninggal dan dimakamkan pada 1980.

Mantan menteri luar negeri Mesir Mohamed Orabi mengatakan, tidak ada kebutuhan strategis pada tahap saat ini untuk mempercepat langkah-langkah dalam hal pemulihan

## Sudah 11 Pekan Menjabat, Netanyahu tak Kunjung Diundang ke Gedung Putih

**WASHINGTON(IM)** - Benjamin Netanyahu telah menjabat sebagai perdana menteri Israel selama 11 pekan. Namun Netanyahu belum melakukan kunjungan ke Washington.

Secara tradisional sebagian besar pemimpin baru Israel telah mengunjungi Amerika Serikat. Hanya dua dari 13 perdana menteri sebelumnya yang memimpin pemerintahan baru menunggu lebih lama untuk berkunjung ke Washington. Gedung Putih menolak untuk mengonfirmasi bahwa, belum ada undangan untuk Netanyahu.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri meminta Reuters menanyakan kepada pemerintah Israel untuk informasi tentang rencana perjalanan perdana menteri. Kedutaan Israel di Washington menolak berkomentar.

"Pesannya ingin mereka kirim adalah, jika Anda mengejar kebijakan yang tidak menyenangkan, tidak ada hak untuk duduk di Oval Office," ujar mantan penasihat senior untuk Utusan Khusus untuk Perundingan Israel-Palestina, David Makovsky.

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri mengatakan, pemerintahan Presiden Joe Biden lebih memilih percakapan yang tenang daripada kritik publik, terutama ketika menyangkut krisis atas usulan perombakan peradilan Israel.

"Apa pun yang akan kami katakan tentang proposal spesifik berpotensi menjadi sangat kontraproduktif," kata pejabat itu yang berbicara dengan syarat anonim.

Pejabat itu menambahkan, tujuannya adalah untuk mendorong para pemimpin Israel membangun konsensus atas reformasi, daripada menentukan hasil yang seharusnya. Anggota Partai Demokrat dari Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Chris Murphy, mengatakan, pemerintah mengirimkan sinyal kuat bahwa mereka mempertahankan dukungan untuk Palestina dan langkah

reformasi peradilan yang diusung Netanyahu dapat membahayakan Israel.

"Saya pasti ingin melihat pemerintah mengirimkan sinyal kuat bahwa kami harus mempertahankan dukungan kami untuk negara Palestina di masa depan dan keputusan yang dibuat pemerintah Netanyahu sekarang sangat membahayakan masa depan itu," kata Murphy.

Sebuah kelompok terpisah yang terdiri dari 92 anggota parlemen progresif mengirim sebuah surat kepada Biden. Dalam surat itu, mereka menekankan bahwa perombakan yudisial dapat memberdayakan orang-orang di Israel yang mendukung pencaplokan Tepi Barat, merusak prospek solusi dua negara dan mengancam keberadaan Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis.

Para pemimpin AS jarang mengkritik kebijakan Israel sejak Menteri Luar Negeri James Baker pada 1989 menasihati negara itu agar tidak bergerak menuju pencaplokan wilayah Palestina dan perluasan permukiman. Baker kemudian mengecam Netanyahu, yang pada saat itu menjabat sebagai wakil menteri luar negeri, setelah dia mengkritik kebijakan AS terhadap Israel.

Sementara Biden sebelumnya mengatakan bahwa dukungan AS untuk Israel cukup kuat. Seorang negosiator perdamaian Timur Tengah AS yang sekarang bekerja di Washington Institute for Near East Policy, Dennis Ross, mengatakan, sulit bagi Biden untuk mengadopsi sikap yang sangat keras terhadap Israel.

"Dia (Biden) lebih suka memiliki Timur Tengah dalam satu kotak sehingga dia hanya bisa fokus pada Rusia, Ukraina, dan Cina. Sayangnya, Timur Tengah memiliki cara untuk memaksakan diri, kecuali kita cukup berinisiatif untuk mencoba mengelola sekitarnya," kata Ross. ● tom

## Disaksikan Kim Jong-un, Korut Luncurkan Rudal Balistik Terbesar untuk Peringatan AS dan Korsel



KIM JONG-UN

**SEOUL(IM)** - Korea Utara meluncurkan rudal balistik antarbenua (ICBM) terbesarnya, Hwasong-17 selama latihan kesiagaan, pada Kamis (16/3). Media pemerintah Korea Utara mengatakan bahwa peluncuran rudal balistik itu adalah tanggapan terhadap latihan militer AS-Korea Selatan yang sedang berlangsung, dan peringatan bagi kedua negara tersebut.

Foto-foto yang dirilis oleh media pemerintah pada Jumat, (17/3) menunjukkan Pemimpin Kim Jong-un menyaksikan peluncuran rudal itu bersama putrinya. Media pemerintah juga menunjukkan gambar-gambar dari luar angkasa yang tampaknya diambil oleh kamera yang dipasang pada rudal tersebut.

Korea Utara menembakkan ICBM ke laut antara semenanjung Korea dan Jepang pada Kamis, beberapa jam sebelum presiden Korea Selatan terbang ke Tokyo untuk pertemuan puncak yang membahas cara-cara untuk melawan Korea Utara yang bersenjata nuklir.

"Latihan peluncuran senjata strategis berfungsi sebagai kesempatan untuk memberikan peringatan yang lebih kuat kepada musuh yang dengan sengaja meningkatkan ketegangan di semenanjung Korea sambil terus-menerus melakukan ancaman militer yang tidak bertanggung jawab dan sembrono," kata kantor berita negara KCNA.

Rudal balistik Korut diluncurkan di bawah resolusi Dewan Keamanan PBB dan peluncuran itu mendapat kecaman dari pemerintah di Seoul, Washington dan Tokyo.

Pasukan Korea Selatan dan Amerika memulai latihan bersama selama 11 hari, yang diikuti "Perisai Kebebasan 23," pada Senin, (13/3). Latihan ini diadakan dalam skala yang tidak pernah terlihat sejak 2017 untuk melawan ancaman Korea Utara yang semakin meningkat.

Kim menuduh Amerika Serikat dan Korea Selatan meningkatkan ketegangan dengan latihan militer tersebut. "Dia menekankan perlunya untuk menimbulkan ketakutan pada musuh, benar-benar mencegah perang dan secara andal menjamin kehidupan damai rakyat kita dan perjuangan mereka untuk konstruksi sosialis dengan memperkuat pencegahan perang nuklir," lapor KCNA.

Tiongkok, yang memiliki pakta pertahanan dengan Korea Utara, juga menyalahkan Amerika Serikat atas ketegangan saat ini, dengan mengatakan bahwa itu disebabkan oleh upaya Washington untuk meningkatkan tekanan terhadap Pyongyang. Hwasong-17 adalah rudal terbesar Korea Utara, dan merupakan ICBM berbahan bakar cair terbesar di dunia. Hal ini diyakini memiliki jangkauan untuk berpotensi mengirimkan hulu ledak nuklir ke sasaran manapun di Amerika Serikat.

Rudal itu diluncurkan dari bandar Pyongyang, dan KCNA mengatakan rudal itu melakukan perjalanan hingga ketinggian maksimum 6.045 km dan terbang sejauh 1.000 km selama lebih dari 69 menit, sebelum jatuh ke laut lepas. Peluncuran itu tidak menimbulkan ancaman keselamatan bagi negara tetangga mana pun, kata laporan itu. ● tom



TAMBANG BESI YANQIANSHAN

Shovel loader yang dikendalikan dari jarak jauh bekerja di bawah tanah di tambang besi Yanqianshan milik Ansteel Mining Co., Ltd. di Kota Anshan, Provinsi Liaoning, Tiongkok, Kamis (16/3). Dalam beberapa tahun terakhir, tambang besi Yanqianshan telah ditingkatkan dan diperbaiki secara cerdas efisiensi produksinya dan dalam dua bulan pertama tahun 2023, tambang tersebut menghasilkan 875.100 ton bijih besi.